

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI  
KOTA CIREBON  
(Studi Kasus di Jalan Pekiringan)**

**Dewi Kusumah<sup>1</sup>, Moh Sutarjo<sup>2</sup>, Iskandar Zulkarnaen<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

E-mail: [mohsutarjo2014@gmail.com](mailto:mohsutarjo2014@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas. Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (2) hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah menerapkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta dengan indikatornya. Namun dari beberapa indikator masih belum ada yang berjalan dengan baik, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan yaitu mengkaji kembali penataan parkir, melakukan pengawasan rutin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas, dan melakukan koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan

**ABSTRACT**

*According to the Cirebon City Regional Regulation Number 7 of 2017 concerning Traffic Management and Engineering, considering that in accordance with Article 95 paragraph (1) letter d of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the Cirebon City Government is given the authority to regulate the determination Road Network User Policy and Traffic Movement. The implementation of the Congestion Management Policy in the City of Cirebon aims to reduce congestion in the City of Cirebon. This study aims to find out (1) how the implementation of congestion handling policies in the city of Cirebon, (2) what are the obstacles in the implementation of congestion handling policies in the city of Cirebon, (3) what efforts are made by the Department of Transportation of the city of Cirebon in dealing with congestion in the city of Cirebon. This study refers to the theory put forward by George C. Edward III which has four factors that play an important role in the success of policy implementation. The factors that influence the success of policy implementation are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. To obtain data and information, researchers conducted interviews and observations and collected documents on the implementation of congestion management policies. Furthermore, the researchers conducted data analysis with three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study indicate that the implementation of congestion management policies in the city of Cirebon has implemented four dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure and its indicators. However, some*

*indicators still have not gone well, including the lack of public awareness in complying with the applicable rules. Meanwhile, the efforts made by the Department of Transportation in dealing with congestion are reviewing parking arrangements, conducting routine supervision, conducting socialization to the public about safety education in traffic, and coordinating with other related agencies or parties.*

**Keyword:** *policy implementation, handling and congestion.*

## LATAR BELAKANG

Penduduk suatu kota memegang peran yang sangat penting dalam setiap studi perkotaan. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk kota baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas merupakan faktor utama dari eksistensi kota itu sendiri. Seiring berkembangnya beragam aktivitas perkotaan, memicu pertumbuhan penduduk sebagai sarana pelaksanaannya. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan ruang kota, oleh karena itu faktor penduduk menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi terbentuknya aktivitas perkotaan. Terdapat berbagai aktivitas yang menjadi ciri perkotaan, antara lain pemukiman, industri, komersial, dan lain-lain.

Disisi lain, masalah transportasi juga sangat berkaitan erat dengan kebijakan tata ruang. Pakar ilmu transportasi Warpani (1987) berpendapat bahwa ruang merupakan kegiatan yang

ditempatkan di atas lahan kota, sedangkan transportasi merupakan sistem jaringan yang secara fisik menghubungkan satu ruang kegiatan dan ruang kegiatan lainnya. Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi akibat dari perencanaan itu sendiri akan menimbulkan keruwetan lalu lintas di kemudian hari yang berakibat dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas dan akhirnya meningkatkan pencemaran udara.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menimbang bahwa untuk

melaksanakan ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis dan Dampak Lalu Lintas. Wali Kota Cirebon memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dalam BAB 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 dalam Peraturan ini daerah ini yang dimaksud dengan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum, pengembangan sistem informasi dan

komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan penyidik terhadap perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kedudukan dinas perhubungan di Kota Cirebon merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Dinas perhubungan kota Cirebon berperan sebagai penunjang dalam menciptakan penyelenggaraan perhubungan yang menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Demi tercapainya akuntabilitas instansi pemerintah yang baik dalam mengurangi angka kemacetan, Dinas Perhubungan dituntut untuk melakukan pembenahan. Pembenahan itu sendiri diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Dinas perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Kota Cirebon dengan luas kota yang hanya 38 km persegi, lalu lintas

kendaraan di Kota Cirebon saat ini sebenarnya sudah tergolong padat. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat mobilitas penduduk yang akhirnya akan mendorong tingkat permintaan jumlah transportasi. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor Kota Cirebon:

Kemacetan di Kota Cirebon terjadi di beberapa titik seperti pusat perbelanjaan, pertokoan, sekolah dan sedikitnya ada 11 perlintasan kereta api di Kota Cirebon, bisa dibayangkan betapa padatnya lalu lintas kendaraan di Kota Cirebon saat ini. Kemacetan itu sendiri dapat dipahami sebagai akibat dari adanya kegiatan masyarakat atau aktivitas ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Kota Cirebon diantaranya masih banyak kendaraan yang berhenti sembarangan, banyak pengendara yang parkir sembarangan, angkutan umum ngetem atau berhenti sembarangan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, adanya perlintasan kereta api dan masih banyak PKL yang berjualan dipinggir jalan. Salah satu jalan yang sering mengalami kemacetan adalah dijalan Pekiringan kota Cirebon.

Berdasarkan fenomena tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak titik-titik kemacetan yang belum teratasi terutama dijalan Pekiringan Kota Cirebon.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan Metode penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono (2016:24) “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk menekankan makna dari pada generalisasi”.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu informan kunci adalah Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan informan pendukung adalah masyarakat yang melintas/pengguna kendaraan di jalan Pekiringan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah (a) studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku arsip, monografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya, (b) studi lapangan, Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data itu. Moleong (2017:330)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon Jalan Rara Santang Nomor 1 Kompleks

Perkantoran Bima, Kesambi Kota Cirebon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kemacetan khususnya di jalan Pekiringan Kota Cirebon, diantaranya adalah sebagai berikut:

### A. Komunikasi

Komunikasi yaitu kemampuan aparatur pelaksana untuk memahami dan menyampaikan semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada semua aparatur sampai tingkat bawah. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan koordinasi terhadap setiap langkah program yang dilaksanakan, seperti:

#### a) Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, penggunaan alat komunikasi tidak langsung dan tidak adanya saluran komunikasi yang mapan juga dapat mengganggu instruksi implementasi.

#### b) Kejelasan

Menurut Edward, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana harus jelas. Adanya kejelasan suatu informasi agar tujuan yang ingin

dicapai dapat diraih sesuai dengan kebijakan.

**c) Kosistensi**

Kosistensi disini bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Kosisten ini terkait dengan sikap, persepsi dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

**B. Sumber Daya**

Sumber daya mempunyai peranan penting di dalam implementasi kebijakan karena bagaimana jelas konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kebijakan, jika para personil bertanggungjawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif, seperti:

**a) Staff**

Menurut Edward, staff merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak

kompeten dibidangnya akan membuat proses implementasi kebijakan berjalan efektif.

**b) Fasilitas (sarana dan prasarana)**

Edward mengatakan bahwa fasilitas merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam implementasi. Dalam parameter ini, penulis mewawancarai pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon terkait apakah fasilitas lalu lintas di Kota Cirebon sudah memadai atau masih kurang memadai, serta masyarakat yang akan diwawancarai tentang apakah Dinas Perhubungan memberikan fasilitas lalu lintas di jalan Pekiringan.

**c) Informasi**

Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah. Kedua, informan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat

melaksanakan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

#### **d) Wewenang**

Wewenang atau kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Wewenang dalam sumber daya adalah wewenang yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan.

### **C. Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang di harapkan, seperti:

#### **a) Insentif**

Edward mengatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif,

#### **b) Pengangkatan Birokrasi**

Pengangkatan birokrasi dalam disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan apabila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur organisasi sebagai pelaksanaan kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, seperti:

#### **a) Standar Operasional Pelaksana (SOP)**

SOP adalah rutinitas yang memungkinkan pejabat publik membuat berbagai keputusan sehari-hari. Dengan adanya SOP, maka kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi atau birokrasi ke arah yang lebih baik adalah dengan melakukan SOP (*Standart Operating Procedure*).

#### **b) Fragmentasi**

Fragmentasi adalah suatu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara unit kerja.



## **Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Di Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

1. Masih banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat dan masih ada yang parkir ganda yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.
2. Angkutan umum (angkot) yang sering ‘ngetem’ dan menurunkan penumpang disembarang tempat sehingga membuat tersendatnya kelancaran lalu lintas.
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu penghambat kemacetan, pedagang tersebut berjualan di ruang jalan sehingga memenuhi ruang jalan sehingga ruang jalan menjadi sempit.
4. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat Dinas Perhubungan sehingga mereka banyak yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

## **Upaya Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon saat menangani hambatan-hambatan implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Jalan pekiringan yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji kembali penataan perparkiran, memonitor dan melakukan pembinaan terhadap juru parkir, melakukan pengawasan terhadap juru parkir oleh UPT Parkir dan memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar peraturan perparkiran (dicabut atau hanya diperingati).
2. Melakukan pengawasan rutin oleh pegawai bidang keselamatan di jalan yang membutuhkan pengawasan salah satunya di jalan Pekiringan.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas.
4. Melakukan koordinasi dalam melakukan penertiban dan pengawasan dengan Kepolisian terkait penindakan pelanggaran oleh pengendara bermotor, dengan Satpol PP terkait pedagang kaki lima, TNI bersama-sama memikirkan bagaimana permasalahan diruas jalan itu bisa



teratasi dengan baik sehingga tidak ada lagi kemacetan di Kota Cirebon ini.

## KESIMPULAN

Hasil pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon (studi kasus di jalan Pekiringan) dapat dilihat dari beberapa variabel sebagai berikut; (1) Komunikasi. Implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas serta kesadaran masyarakat yang masih acuh terhadap kedisiplinan terhadap rambu-rambu lalu lintas, (2) Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurunkan 30 personil bidang keselamatan yang dibagi beberapa titik untuk membantu mengatur lalu lintas di kota Cirebon yang perlu adanya bantuan atau pengawasan dari pihak kami seperti di jalan Pekiringan tetapi dengan terbatasnya waktu dan jam kerja pegawai bidang keselamatan tidak selalu ada di lapangan, (3) Disposisi, tidak ada pengangkatan personil secara khusus dan tidak ada insentif yang diberikan kepada pegawai

dari Pihak Dinas Perhubungan. Insentif merupakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif, dan (4) Struktur Birokrasi. Untuk parameter ini Dinas Perhubungan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*). Penyaluran tanggung jawab sudah dilakukan dengan tugas yang diberikan dan penyaluran tanggung jawab sudah sesuai dengan jabatan atau posisi di DISHUB jadi melakukan tugasnya sesuai dengan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agus, Erwan dan Dyah Ratih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lexy. J. Moloeng, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Kedua enam. Bandung: Alfabeta

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Rdb*, Bandung: Alfabeta

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2016. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dalam pasal 95 ayat (1)

UU 22 Tahun 2009 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 47 Tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Noor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2001 Tentang kewenangan dibidang teknis perhubungan dibentuk organisasi tata kerja perhubungan kota Cirebon

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 22.I Tahun 2004 dengan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Cirebon

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 28 Desember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon

#### **Sumber-Sumber Lainnya**

Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021

Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2022

Admin Bidang PKIP. 2020. *Pemda Kota Cirebon Berupaya Kurangi Tingkat Kemacetan Lalu Lintas*

Kaweri, Yn. 2015. *Pengertian Kemacetan Lalu Lintas*.

<http://e-journal.uajy.ac.id/11962/3/TS142932.pdf>

Nugroho, sbm. 2018. *Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan*. Media Ekonomi dan Manajemen. Vol 33, (2), 164-174

Sari, Feby Anisia Purnama. 2011. *Analisis Kebijakan Penanganan*

*Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Teuku Umar.*

<http://eprints.undip.ac.id/26697/>

<https://www.cirebonkota.go.id/2020/wali-kota-pemda-kota-cirebon-berupaya-untuk-kurangi-tingkat-kemacetan-lalu-lintas/>